

BAB

5

ARTIKEL 1 TANTANGAN PEREKONOMIAN INDIA

OLEH: FENTY TIRTASARI EKARINA DAN DIAH INDIRA

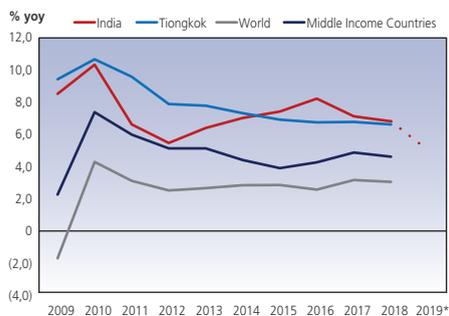
Setelah mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam periode yang cukup panjang, kinerja ekonomi India mulai melambat sejak 2016. Perlambatan pertumbuhan ekonomi kian dalam hingga 4,5% yoy pada triwulan tiga 2019. Sejumlah permasalahan menjadi faktor penyebab pelemahan ekonomi antara lain problem di sektor tenaga kerja, kebijakan demonetisasi, dan keterbatasan pembiayaan. Respons kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk mengatasi pelemahan ekonomi belum dapat membangkitkan ekonomi India. Permasalahan India dan dinamika kebijakan pemerintah dapat menjadi lesson learned yang baik bagi Indonesia agar terhindar dari masalah serupa.

Secara historis, India memiliki peranan yang cukup signifikan pada perekonomian dunia. Sejak awal dekade terakhir hingga 2016, ekonomi India tumbuh

akseleratif dengan rerata pertumbuhan 6,9% yoy, jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia (2,7% yoy). Bahkan sejak 2013, India berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rerata *growth* negara *middle income countries* (Grafik 1). Selanjutnya pada 2016, pertumbuhan ekonomi India berhasil mencapai 8,2% yoy, melampaui Tiongkok (6,7% yoy). Skala ekonomi India cukup besar dengan kontribusi terhadap PDB dunia menempati urutan ke-6 pada 2017 (3,2%).¹ Dari sisi perdagangan, India juga merupakan negara eksportir terbesar ke-17 di dunia dan menempati urutan ke-45 dari sisi kompleksitas ekonomi.²

1 World Bank, 2017, *GDP based on Purchasing Power Parity (PPP)*.

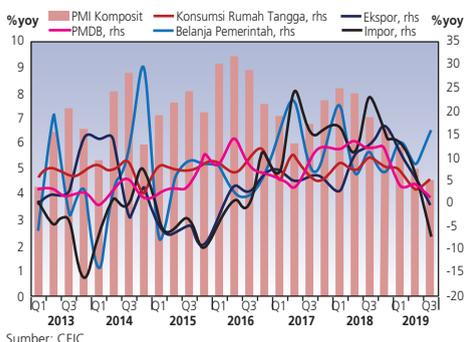
2 *Economic Complexity Index (ECI)*, merupakan indeks pembangunan ekonomi yang mengukur kemampuan produktivitas dari sistem ekonomi secara holistik yang dikembangkan oleh Universitas Harvard melalui lembaga Centre for International Development, AS. ECI menggunakan matriks *eigenvector* yang mengukur hubungan antarnegara berdasarkan produk yang di ekspor. ECI menggunakan data ekspor 2013-2017.



Sumber: World Bank

*: Proyeksi RBI untuk Tahun Fiskal 2019-2020 pada MPC Meeting Desember 2019 Tahun fiskal India: April-Maret

Grafik 1. Pertumbuhan PDB India dan Dunia –Tahunan



Sumber: CEIC

Grafik 2. Pertumbuhan PDB India - Triwulanan

Setelah tumbuh akseleratif, ekonomi India mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi India mulai melambat pada pertengahan 2018. Hampir seluruh komponen pengeluaran PDB menurun (Grafik 2). Konsumsi dan investasi menurun dipengaruhi pelemahan permintaan domestik dan global, serta kondisi likuiditas yang ketat. Ekspor melemah dipicu perlambatan permintaan global akibat perang dagang AS-Tiongkok, kenaikan tarif atas ekspor baja dan

aluminium ke AS, serta dihapuskannya India dari negara penerima fasilitas *Generalized Preference System* oleh AS.³ Impor turut melemah akibat penurunan permintaan domestik dan retaliasi India atas beberapa produk impor AS (reaksi dari kenaikan tarif ekspor baja dan aluminium oleh AS).

Perlambatan ekonomi India masih berlanjut hingga triwulan tiga 2019. Pertumbuhan ekonomi India TW3-19 melambat signifikan menjadi hanya 4,5% yoy pada TW3-19, dari sekitar 5% pada TW2-19, dan merupakan level pertumbuhan terendah sejak 2014. Ekspor berkontraksi -0,4% (dari 5,7% pada TW2-19) akibat pelemahan *demand* eksternal dan tarif ekspor ke AS yang lebih mahal. Investasi tertekan oleh pengetatan kondisi likuiditas yang menahan pembiayaan domestik.⁴ Konsumsi juga terindikasi masih rendah, tercermin dari realitas bahwa sedikit perbaikan pada TW3-19 lebih dipengaruhi oleh faktor *seasonal* perayaan Diwali.⁵

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan belum membuahkan hasil. Dalam merespons pelemahan ekonomi, otoritas moneter dan fiskal telah menempuh kebijakan akomodatif. Reserve Bank of India (RBI) telah menurunkan

3 Mulai 23 Maret 2018: ekspor baja dan aluminium dikenakan tarif masing-masing 25% dan 10%. Pada Juni 2018, India dihapuskan dari negara penerima fasilitas GSP oleh AS (shg ekspor ke AS akan dikenakan pajak).

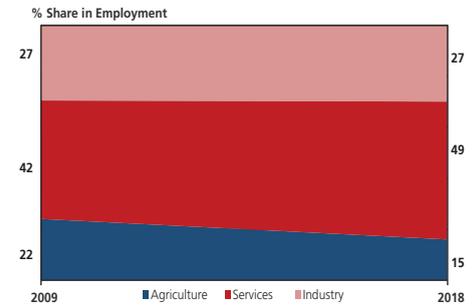
4 Investasi penanaman modal domestik bruto (PMDB) menurun ke 1% yoy dari 4,0%.

5 Konsumsi TW3-19 tumbuh (5,1% yoy dr 3,1% pada TW2-19).

suku bunga hingga 135 bps selama 2019, dan mengeluarkan aturan acuan suku bunga agar transmisi moneter lebih efektif. Pemerintah juga telah meningkatkan belanja sehingga memperlebar defisit fiskal. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat memperbaiki kinerja ekonomi. Deselerasi ekonomi selama enam triwulan berturut-turut, menimbulkan dugaan bahwa pelemahan ekonomi India lebih dipengaruhi oleh faktor struktural dibandingkan siklikal. Sejumlah faktor yang diperkirakan memengaruhi pelemahan ekonomi India, antara lain pergeseran peranan sektor ekonomi dari pertanian ke sektor jasa (tidak melalui peralihan pada basis industri seperti negara lain), masalah sektor ketenagakerjaan, kebijakan demonetisasi dan GST, serta keketatan likuiditas.

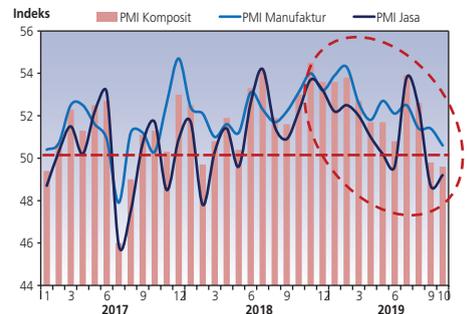
Pergeseran Peranan Sektor Ekonomi India

India mengalami pergeseran komposisi sektor ekonomi selama satu dekade terakhir, dengan peranan sektor jasa yang meningkat. Sektor pertanian yang sebelumnya mendominasi, telah mengalami penurunan pangsa terhadap PDB menjadi 15% pada 2018, dibandingkan 22% pada 2009 (Grafik 3). Dalam kurun waktu yang sama, sektor industri relatif tidak mengalami pergerakan yaitu tetap 27% terhadap PDB. Berbeda dengan kedua sektor lainnya, peran sektor jasa makin dominan dengan pangsa yang tumbuh pesat dari 42% terhadap PDB (2009) menjadi 49% (2018).



Sumber: CEIC

Grafik 3. Sectoral Shifting in GDP



Sumber: CEIC

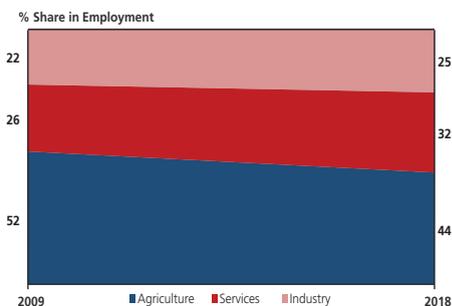
Grafik 4. Perkembangan Indeks PMI

Pergeseran peranan sektor ekonomi India tidak melalui basis industri. Pada umumnya, proses *shifting* ekonomi bergerak dari basis agraris, kemudian berlanjut menjadi industri dan jasa. Namun dalam kasus India, pergerakan peranan ekonomi terjadi secara langsung dari berbasis agraris menjadi jasa. Kondisi tersebut di satu sisi dipengaruhi oleh sektor tenaga kerja yang cukup kuat, dengan sumber daya manusia berpendidikan tinggi, lancar berbahasa Inggris, dan upah rendah. Sementara di sisi lain, sektor industri menghadapi problem seperti pembatasan masuknya investasi asing, dukungan

pemerintah terhadap industri swasta yang minim, dan penurunan *weighted average basic import duty rates* impor barang manufaktur pada 2008. Tingginya ketergantungan India pada sektor jasa perlu mendapat perhatian, sejalan dengan pelemahan sentimen bisnis sektor jasa (PMI Jasa) TW3-19 yang cukup tajam dan memasuki teritori negatif (Grafik 4).

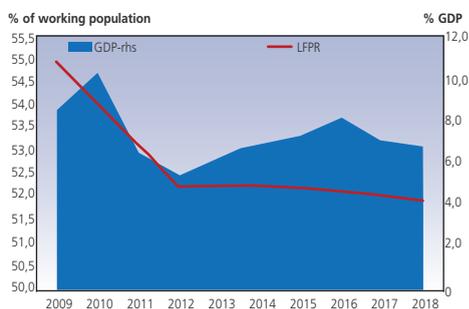
Permasalahan Struktural pada Ketenagakerjaan

Shifting basis perekonomian India tidak searah dengan pergerakan pada sektor tenaga kerja. Pergeseran basis perekonomian dari sektor pertanian kepada sektor jasa tidak diikuti dengan *shifting* tenaga kerja. Sektor pertanian tetap mendominasi pasar tenaga kerja India, meski pangsaanya telah berkurang. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian turun sebesar 8% selama periode 2009-2018. Sementara pangsa tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri dan jasa masing-masing naik sekitar 5% dan 3% (Grafik 5). Sektor jasa memiliki kontribusi hampir separuh dari PDB India 2018, namun hanya menyerap sepertiga dari keseluruhan jumlah pekerja. Penyerapan sektor jasa yang tertahan menyebabkan tingginya jumlah pengangguran di India (rerata Januari-November 2019 sebesar 7,5%). Sejak 2012, hanya separuh dari jumlah populasi *working age* India yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan (Grafik 6).



Sumber: ILO

Grafik 5. *Employment Share per Sector*



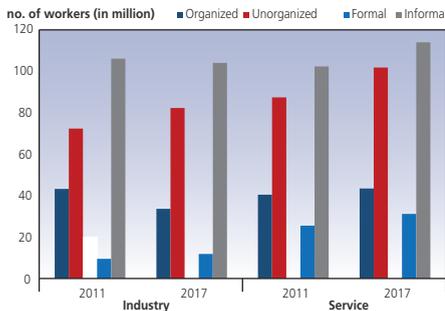
Sumber: World Bank

Grafik 6. *Labour Force Participation Rate*

Struktur tenaga kerja India didominasi oleh pekerja sektor informal dan *unorganized*.⁶ *Shifting* perekonomian India dari sektor pertanian ke jasa, belum diikuti dengan *shifting* tenaga kerja dari sektor informal ke formal. Angkatan kerja India di sektor jasa informal bahkan makin bertambah (Grafik 7). Hal ini disebabkan mayoritas tenaga kerja sektor *non-farm*, bekerja pada unit usaha dengan kapasitas tenaga kerja kurang dari 10 orang. Perusahaan skala kecil

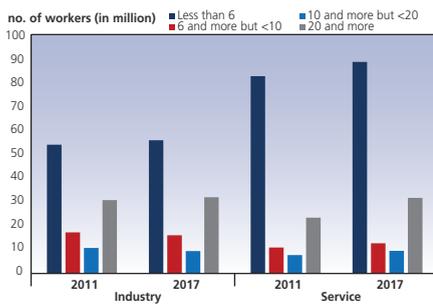
⁶ *Unorganized sectors* adalah sektor usaha yang terdiri dari perusahaan berskala kecil dan tidak terdaftar di pemerintah. *Informal sectors* adalah sektor usaha yang tidak masuk dalam perhitungan PDB dan PNB.

ini menampung tenaga kerja cukup banyak mencapai 68% dari keseluruhan tenaga kerja *non-farm* selama 2017-18 (Grafik 8). Jumlah tersebut cukup besar sejalan dengan tendensi pengusaha yang lebih memilih untuk beroperasi dalam skala kecil dan tidak terdaftar resmi, untuk menghindari aturan yang lebih ketat pada perusahaan besar.⁷



Sumber: CSE Working Paper, 2019

Grafik 7. Jumlah Pekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal serta Organized dan Unorganized



Sumber: CSE Working Paper, 2019

Grafik 8. Jumlah Pekerja Berdasarkan Skala Usaha

⁷ Perusahaan besar terikat pada 44 aturan ketenagakerjaan, antara lain: jika jumlah karyawan melebihi 100 orang, perusahaan harus memperoleh izin khusus dari *state government* jika akan melakukan keputusan hubungan kerja atau menutup usaha.

Ekonomi Terdampak Kebijakan Demonetisasi dan Perpajakan

Kebijakan demonetisasi menjadi salah satu sumber *shock* yang berdampak negatif pada perekonomian. Pemerintah pada 8 November 2016 mengeluarkan kebijakan demonetisasi untuk menghentikan peredaran uang palsu, termasuk uang ilegal hasil kejahatan dan kegiatan terorisme. Kebijakan tersebut mengatur penarikan mata uang pecahan lama INR500 dan INR1000, yang digantikan oleh pecahan baru INR500 dan INR2000. Kebijakan yang berlaku satu hari pasca pengumuman telah menimbulkan kepanikan dan mengganggu aktivitas ekonomi. Pasalnya, lebih dari 90% transaksi di India dilakukan secara *cash*, dan setidaknya 86% *cash in circulation* merupakan pecahan INR500 dan INR1000 lama.

Demonetisasi menyebabkan disrupsi pada perekonomian. Kebijakan demonetisasi memicu kelangkaan uang tunai selama beberapa pekan setelah pengumuman. Dampak makin parah karena pemerintah juga membatasi penukaran uang pecahan lama, pembatasan penarikan uang dari ATM dan rekening bank, serta perbedaan ukuran uang membutuhkan konfigurasi ulang pada mesin ATM.⁸ Kelangkaan pecahan uang seri baru mengakibatkan petani tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli benih, pupuk dan pestisida sehingga produksi pangan terganggu. Penurunan kinerja juga

⁸ Boks Kerentanan Ekonomi India Akibat Kebijakan Demonetisasi, PEKKI Edisi I, 2017

terjadi pada sektor manufaktur, jasa dan transportasi.

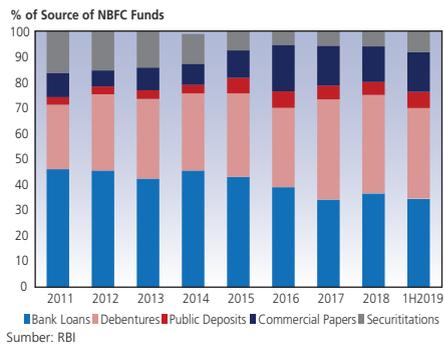
Penerapan reformasi perpajakan *Government Services Tax* (GST) turut melemahkan ekonomi India pada 2017. Pemerintah pada 1 Juli 2017 mengimplementasikan GST yang bertujuan untuk meningkatkan *tax collection* dengan menyederhanakan perhitungan pajak. Dalam jangka panjang, kebijakan GST diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pada tahap awal implementasi, prosedur pengisian dan klaim GST yang kompleks, serta penundaan pengembalian kredit GST menekan eksportir dan UMKM. Aktivitas manufaktur turun akibat eksportir dan UMKM melakukan pengurangan produksi dan persediaan, serta berdampak pada penurunan penerimaan pajak pemerintah pada akhir tahun fiskal 2016/2017.

Krisis NBFC Memicu Keketatan Likuiditas

India mengalami keketatan likuiditas akibat krisis pada sektor keuangan nonbank. Menjelang akhir 2018, ekonomi India kembali diguncang *shock* yang diawali dari kepailitan salah satu *Non-Banking Financial Company* (NBFC) terbesar di India yang bergerak pada pendanaan proyek infrastruktur yaitu *Infrastructure Leasing and Financial Services* (IL&FS). Perusahaan IL&FS pailit akibat kompleksitas akuisisi lahan dari proyek infrastruktur yang dibiayai serta dijadikan agunan. Kebangkrutan IL&FS merugikan

pension funds, mutual funds, investment house dan bank sebagai kreditur IL&FS, serta meningkatkan rasio NPL bank.⁹

Kreditor mengetatkan persyaratan pinjaman dan makin menekan NBFC. Pasca *default* IL&FS, bank dan *debentures* — sebagai *lenders* utama NBFC—mengetatkan persyaratan pinjaman. Akibat pengetatan tersebut, NBFC mengalihkan sumber pembiayaan menjadi *securitization agent* dengan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengompensasi risiko (Grafik 9).¹⁰ Pengetatan persyaratan pinjaman dan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan krisis likuiditas pada NBFC. Pada enam bulan pertama 2019, arus pendanaan dari nonbank kepada sektor komersil turun lebih dari separuh periode sebelumnya (Grafik 10).

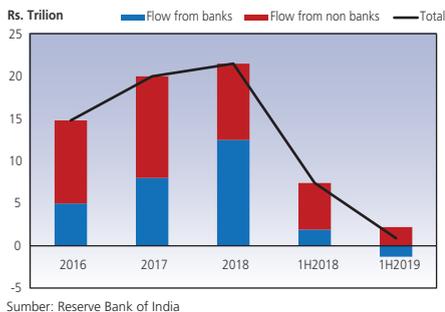


Grafik 9. NBFC Source of Funds

9 Bank menjadi kreditur utama IL&FS dengan pangsa 61% dari *total financing*.
 10 *Pool asset* dari *securitization agent* berasal dari pinjaman ritel berjangka pendek seperti kartu kredit, kredit kepemilikan kendaraan, dan pinjaman jangka pendek lainnya. *Securitization agent* mengenakan bunga lebih tinggi dari bank.

Risk Aversion Bank Meningkat

Perbankan cenderung menghindari menyalurkan kredit untuk menghindari risiko (*risk aversion*). Peningkatan *risk aversion* tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit bank di tengah terjadinya penurunan kredit NBFC akibat krisis likuiditas. Rilis RBI memperlihatkan penurunan penyaluran kredit komersial bank dan NBFC yang turun tajam pada paruh pertama 2019. Sebelum krisis NBFC (paruh pertama 2018), penyaluran kredit bank kepada sektor komersial mencapai INR1,9 triliun, dan kemudian menurun hingga terkontraksi INR1,3 triliun pasca *shock* NBFC (Grafik 10).¹¹

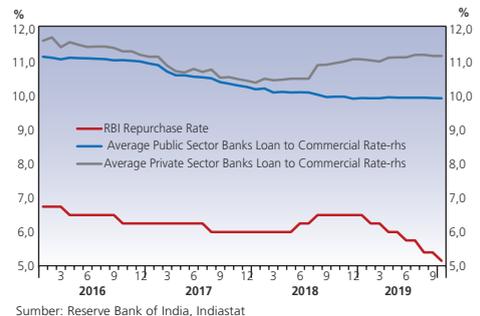


Grafik 10. Flow of Funds Bank dan Nonbank pada Sektor Komersial

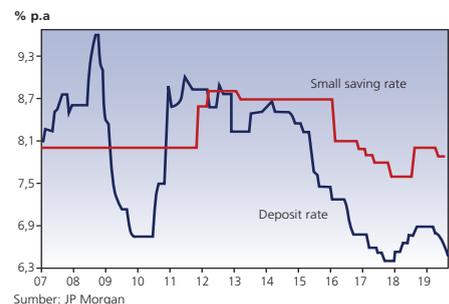
Risk aversion perbankan juga tercermin dari suku bunga kredit yang masih tinggi. Perbankan masih mengenakan suku bunga kredit relatif tinggi meski RBI telah menurunkan *policy rate* dengan cukup agresif (135 bps selama 2019 menjadi 5,15%). *Gap*

¹¹ RBI mendefinisikan sektor komersial sebagai sektor ekonomi di luar pertanian, manufaktur dan transportasi.

antara rerata suku bunga kredit *public bank* atau *private bank* dengan RBI *repo rate* masih sangat tinggi (Grafik 11). Perbankan telah berupaya menurunkan suku bunga kredit, tercermin dari penurunan suku bunga deposito yang mulai menurun meski masih di atas *repo rate* RBI (Grafik 12). Namun, upaya tersebut masih mendapat tantangan dari relatif tingginya suku bunga *small savings*. Kondisi ini mengakibatkan perbankan menahan laju penurunan suku bunga deposito lebih jauh, untuk menghindari penurunan penempatan dana nasabah dalam bentuk deposito pada sektor perbankan.¹²



Grafik 11. RBI Repo Rate vs Bank Rate



Grafik 12. Deposito dan Small Savings Rate

¹² *Small Saving* meliputi simpanan melalui kantor pos, *savings certificates* dan *social security schemes*.

Lesson Learned Bagi Indonesia

Pelemahan ekonomi India perlu diatasi dengan reformasi struktural dan memberikan *lesson learned* bagi Indonesia. Pemerintah perlu melakukan kebijakan struktural agar India dapat kembali tumbuh akseleratif, serta mengatasi permasalahan pada sektor pertanian, industri, dan jasa. Agenda reformasi juga perlu mengedepankan perbaikan aturan ketenagakerjaan agar lebih fleksibel untuk mendorong sektor manufaktur dan mengundang investasi asing. Pemerintah India juga perlu memperbaiki masalah pada sektor keuangan untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas. Indonesia dapat memetik *lesson learned* dari kondisi India antara lain (a) otoritas perlu antisipatif terhadap perubahan; (b) setiap kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan transparan; dan (c) melakukan komunikasi yang jelas meliputi tujuan, mekanisme dan tahapan dari kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Referensi

- Bhat, TP. *Structural Changes in Manufacturing Sector and Growth Prospect India*, Institute for Studies for Industrial Development-New Delhi, Working Paper Series No.173, 2014.
- Bhattarai, Keshab. *Impact of GST Reforms on Efficiency, Growth, and Redistribution of Income in India: A Dynamic CGE Analysis*, ASSA/AIEFS, 2019.
- Business Standards. What is IL&FS Crises. August 2019. URL: <https://www.business-standard.com/amp/about/what-is-il-fs-crisis>
- Chandak, BL. *Chinese Imports are Undermining Make in India*. October 2018. URL: <https://www.thehindubusinessline.com/opinion/chinese-imports-are-undermining-make-in-india/article25324776.ece>
- Das, Pradip Kumar Das. *Impact of Demonetization on Indian Economy*. American Journal of Business and Management, 2019.
- Firstpost. *Banks' high retail loan book due to securitisation by NBFCs, not actual credit demand: Crisil*. URL: <https://www.firstpost.com/business/banks-high-retail-loan-book-due-to-securitisation-by-nbfc-not-actual-credit-demand-crisil-7767261.html>
- India Today. *World Picked Up in 2017 but India Went Down Because of Note Ban, GST: Raghuram Rajan*. November 2018. URL: <https://www.indiatoday.in/business/story/world-picked-up-in-2017-but-india-went-down-because-of-note-ban-gst-raghuram-rajan-1385792-2018-11-10>.
- Mehrotra, Santosh and Parida, Jajaji K. *India's Employment Crisis: Rising Education Levels and Falling Non Agricultural Job Growth*, Azim Premji University, CSE Working Paper Series 04, 2019.
- Reserve Bank of India. *Monetary Policy Report*. October and December 2019.

ARTIKEL 2

KOORDINASI DAN SINERGI DALAM MENARIK INVESTASI ASING MELALUI LINKAGE IRU-RIRU-GIRU

OLEH: BAMBANG SATYA PERMANA

Sebagai upaya menjaga persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan telah membentuk Investor Relation Unit (IRU). Pada perkembangannya, BI bersama dengan stakeholder di daerah dan luar negeri kemudian membentuk linkage IRU-RIRU-GIRU sebagai bentuk integrasi kegiatan hubungan investor di daerah, pusat, dan luar negeri dalam rangka mengelola persepsi positif terhadap perekonomian nasional & regional/daerah. Sejalan dengan tantangan yang dihadapi, linkage IRU-RIRU-GIRU juga berperan dalam mempertemukan supply dan demand untuk mendorong investasi di daerah.

Pembentukan IRU-RIRU-GIRU dalam rangka Mengelola Persepsi Positif Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan membutuhkan investasi,

baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung. Perilaku investor dalam melakukan investasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap perekonomian negara tersebut. Persepsi erat diasosiasikan dengan iklim investasi dan tingkat risiko suatu negara yang ditunjukkan oleh indikator-indikator jangka menengah dan panjang, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, cadangan devisa, termasuk peringkat kredit suatu negara (*sovereign credit rating*).

Sejak tahun 2007 Bank Indonesia telah menginisiasi pembentukan *Investor Relations Unit* (IRU) dengan tujuan untuk secara aktif dan terencana membangun persepsi positif mengenai perekonomian Indonesia. Pada tahun itu pula, dengan kesepakatan dua instansi lainnya, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) menjalankan mandat menjadi koordinator IRU nasional. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan *Sovereign Credit Rating* Indonesia yang dipandang sebagai salah

satu indikator terpenting dalam mengukur persepsi perekonomian Indonesia, khususnya bagi investor portofolio yang hendak membeli surat berharga pemerintah Republik Indonesia.

Pada perkembangannya, upaya untuk mendukung pengelolaan persepsi positif juga dilakukan di daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi, khususnya terkait investasi langsung (*Foreign Direct Investment* - FDI). Sejak 2015, Bank Indonesia turut aktif meningkatkan daya tarik investasi di daerah dengan mendorong insiatif pembentukan *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) di tingkat Pemerintah Provinsi. RIRU berperan dalam melakukan koordinasi dalam rangka mendorong sinergi antar instansi dan lembaga

di daerah untuk memastikan persepsi positif investor atas kondisi ekonomi daerah, khususnya dalam kegiatan promosi investasi daerah. Terdapat 4 elemen utama yang dilakukan oleh RIRU secara kontinyu, yaitu (1) kegiatan koordinasi & perumusan strategi antar instansi dan lembaga, (2) diseminasi data dan informasi ekonomi daerah, (3) membina hubungan baik dengan mitra daerah (*stakeholder engagement*), dan (4) internalisasi hasil komunikasi dengan stakeholder untuk perbaikan dan efektivitas kebijakan ekonomi di daerah. Sampai saat ini, tercatat tujuh provinsi yang sudah membentuk kelembagaan RIRU, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Gambar 1. Kelembagaan Regional Investment Relation Unit (RIRU) di 7 Provinsi



Upaya menarik aliran modal investasi ke Indonesia juga didukung dengan pembentukan *Global Investor Relations Unit* (GIRU). Keberadaan GIRU diharapkan menjadi wadah koordinasi antara Kantor Perwakilan BI di luar negeri (KPwLN) dengan perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) di wilayah kerjanya, khususnya dengan KBRI/KJRI, Indonesia *Investment Promotion Centre* (IIPC) yang dikelola oleh BKPM, dan *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC) yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. Mengingat secara geografis posisi GIRU lebih dekat dengan investor luar negeri, maka GIRU menjadi perpanjangan tangan fungsi IRU Nasional dalam melakukan kegiatan hubungan investor melalui diseminasi perkembangan terkini ekonomi Indonesia. GIRU juga diharapkan dapat mempertemukan *supply* dan *demand* investasi melalui penyelenggaraan forum bisnis. Otoritas baik di level nasional maupun regional akan menghadiri forum bisnis tersebut untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia kepada *stakeholder* luar negeri khususnya investor sektor riil.

Kegiatan *linkage* IRU-RIRU-GIRU dalam Mendorong Investasi

Saat ini perekonomian nasional menghadapi berbagai tantangan dari sisi eksternal, diantaranya kondisi global yang belum sepenuhnya pulih, situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia, dampak dari *trade war*, dan disrupsi teknologi digital yang secara signifikan mengubah cara

kerja sekaligus cara hidup. Pada sisi internal, perekonomian Indonesia mengalami *Current Account Deficit* (CAD) yang persisten, yang antara lain disebabkan oleh kinerja ekspor yang belum membaik dan investasi yang belum kuat, terutama investasi pada sektor yang dapat meningkatkan ekspor. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Bank Indonesia berupaya mencari solusi melalui koordinasi untuk strategi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga (K/L).

Salah satu hasil dari koordinasi lintas K/L tersebut adalah upaya bersama untuk mendorong investasi asing (FDI) dan ekspor. Terkait hal ini, *linkage* IRU-RIRU-GIRU dapat memanfaatkan sumber daya dan konektivitas yang dimiliki mulai dari daerah (RIRU), di pemerintahan pusat (IRU), hingga ke luar negeri (GIRU). *Linkage* IRU-RIRU-GIRU memanfaatkan tahapan proses kerja yang saling terkait (*end-to-end*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

Pada tahap perencanaan, RIRU melakukan asesmen potensi *supply*, dalam bentuk proyek investasi milik Pemerintah Daerah yang siap ditawarkan (*clean & clear project*), identifikasi program promosi sesuai prioritas Pemerintah Daerah, dan penyusunan materi untuk melakukan promosi investasi. Pada sisi lain, GIRU di luar negeri melakukan asesmen potensi *demand*, dalam bentuk pemetaan investor potensial, dan melakukan identifikasi program promosi yang diinisiasi oleh KBRI/KJRI dan IIPC. Sementara itu, IRU di pusat bertindak sebagai koordinator dan

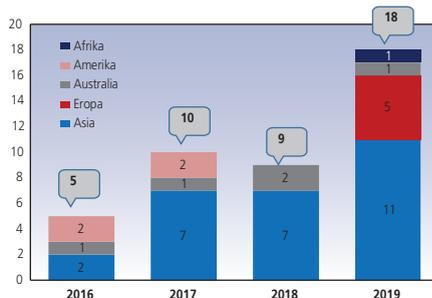
penghubung antara RIRU dengan GIRU, dan juga melakukan identifikasi program promosi investasi antar K/L di pusat, khususnya antara BI, Kementerian Luar Negeri dan BKPM. Selain itu, IRU juga menyusun dan mendiseminasikan materi perekonomian nasional untuk kebutuhan promosi investasi.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan promosi investasi dilakukan melalui keikutsertaan RIRU pada forum bisnis yang diselenggarakan oleh GIRU maupun oleh pihak lain dan membuka gerai (*booth*) pameran. Pada kegiatan pameran tersebut, IRU-RIRU-GIRU memastikan kesiapan materi, narasumber, dan kegiatan pertemuan bisnis (*one-on-one meeting*) antara pemilik proyek dengan investor potensial sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama dalam membiayai suatu proyek.

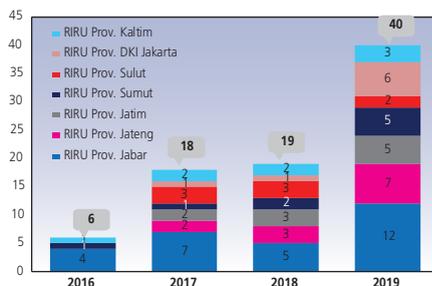
Pada tahap monitoring dan evaluasi tindak lanjut, IRU-RIRU-GIRU senantiasa berkoordinasi untuk menindaklanjuti pertemuan bisnis (*one-on-one meeting*) yang sudah dilakukan pada saat pameran melalui komunikasi intensif, sehingga diharapkan ada kegiatan kunjungan langsung dari investor ke lapangan (*site-visit*) dan/atau kesepakatan lebih lanjut antara pemilik proyek dengan investor.

Pada periode 2016 s.d. Nov. 2019, terdapat total 42 kegiatan promosi investasi & perdagangan yang dihadiri oleh RIRU, dengan sebaran lokasi terbesar berada di Asia. Keikutsertaan RIRU pada kegiatan promosi meningkat setiap tahunnya dan tercatat

RIRU Provinsi Jawa Barat paling aktif dalam mengikuti kegiatan promosi (grafik 1 dan 2).

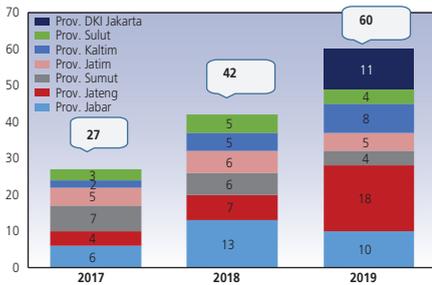


Grafik 1. Jumlah dan Sebaran Lokasi Kegiatan Promosi Investasi yang Diselenggarakan dan Diikuti oleh IRU-RIRU-GIRU periode 2016-2019



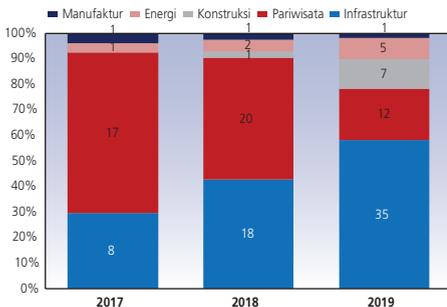
Grafik 2. Jumlah Keikutsertaan RIRU Provinsi dalam Kegiatan Promosi Investasi periode 2016-2019

Pada periode 2017 s.d. November 2019, jumlah proyek investasi yang dipromosikan oleh RIRU Provinsi meningkat setiap tahunnya dimana Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah proyek paling banyak (grafik 3).



Grafik 3. Jumlah Proyek yang Dipromosikan oleh RIRU Provinsi periode 2017-2019

Berdasarkan jenis proyek yang dipromosikan, selama periode 2017 s.d. November 2019, mayoritas proyek yang dipromosikan oleh RIRU Provinsi merupakan proyek infrastruktur yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat dalam mempersiapkan infrastruktur produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah (grafik 4).



Grafik 4. Jenis Proyek yang Dipromosikan oleh RIRU Provinsi periode 2017-2019

Kegiatan promosi investasi yang dilakukan dalam *linkage* IRU-RIRU-GIRU

tersebut telah mempertemukan pemilik proyek dengan investor asing yang terus dievaluasi tindak lanjutnya. Beberapa Pemerintah Provinsi juga mencoba menindaklanjuti hasil pameran di luar negeri melalui kegiatan forum investasi yang dilakukan di dalam negeri dengan mengundang para investor asing pada forum investasi di daerah, diantaranya adalah *West Java Investment Summit (WJIS)* dan *Central Java Investment Business Forum (CJIBF)*.

Kegiatan *linkage* IRU-RIRU-GIRU tergolong relatif baru sehingga masih terbuka peluang untuk terus dikembangkan dan disempurnakan. Namun, inisiatif ini menawarkan konsep keterpaduan (*synergized*), pertemuan minat investor potensial dengan potensi investasi daerah (*targeted*), dengan harapan dapat memberikan hasil nyata dari kegiatan *matchmaking* tersebut (*outcome oriented*).

Halaman ini sengaja dikosongkan